

Judul : Panja Hambalang tolak interpelasi
Tanggal : Selasa, 20 November 2012
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Panja Hambalang Tolak Interpelasi

JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Hambalang Komisi X DPR menolak rencana pengajuan hak interpelasi (bertanya) kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pengembangan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Panja menilai interpelasi hanya akan menjadi panggung politik para politisi di parlemen. Hak interpelasi ini sebelumnya direkomendasikan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR untuk menyelesaikan kasus Hambalang.

Ketua Panja Hambalang Komisi X DPR Agus Hermanto mengatakan, kasus Hambalang ini cukup diselesaikan oleh panja. Saat ini, panja yang dibiayai oleh uang rakyat sedang berjalan. "Kalau mau interpelasi, diproses saja sesuai undang-undang. Dari semua fraksi memberikan pandangannya, tapi kalau menurut saya interpelasi hanya menghamburkan uang rakyat. Jika uang rakyat hanya digunakan untuk panggung politik dan pencitraan saja, apakah rela?" tandas Agus di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Panja Hambalang optimistis semua masalah yang terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang akan bisa diselesaikan di tingkat panja. Saat ini, panja tetap memprosesnya dan terus di-

kuatkan melalui masukan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Panja, ujarnya, juga sudah meminta BPK untuk lebih menguatkan penyelesaian kasus Hambalang. Bahkan, panja sudah melibatkan anggota dari Komisi V DPR sebagai pihak yang memahami masalah infrastruktur. "Kalau masalah anggaran, Komisi X DPR bertanggung jawab. Kalau masalah hukum yang menangani aparat penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini kasus Hambalang sedang berproses dan masuk tahap penyidikan di KPK," paparnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Panja Hambalang, Agus menyampaikan, pihaknya berjanji akan memublikasikan semua kegiatan. Dia juga menjamin semua dokumennya tidak dirahasiakan. Panja Hambalang bisa diakses publik.

Senada diungkapkan anggota Panja Hambalang Komisi X DPR Raihan Iskandar. Dia sepakat agar kasus Hambalang cukup diselesaikan di panja

saja. Pasalnya, jika sudah masuk interpelasi, kasus ini akan menjadi bola liar. "Karena akan banyak campur tangan politik, padahal kasus seperti Hambalang ini butuh kajian mendalam, termasuk kajian teknis. Ini sudah menjadi tanggung jawab panja. Jadi, biarkan panja yang menyelesaikannya," tandasnya.

"Tapi kalau menurut saya interpelasi hanya menghamburkan uang rakyat."

AGUS HERMANTO
Ketua Panja Hambalang
Komisi X DPR

Raihan mengemukakan, Panja Hambalang dalam waktu dekat akan melahirkan kesimpulan dan rekomendasi. Rencananya, sebelum mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi, panja terlebih dulu berkoordinasi dengan BAKN DPR. Panja juga sudah menekankan agar pada masa sidang II DPR tahun 2012-2013 ini persoalan Hambalang dapat diselesaikan.

Dia mengakui belum adanya kesimpulan dan rekomendasi dari panja bukan lantaran kinerja panja lamban. "Ini karena BPK memberikan hasil laporan pada masa reses, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-

apa. Saya harap dari hasil audit investigatif BPK tahap I dan telaahan BAKN DPR bisa diambil satu kesimpulan. Saya sendiri yakin penyelesaian soal Hambalang ini sudah bisa terselesaikan melalui audit investigatif BPK dan telaahan BAKN," paparnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, bagaimanapun pihaknya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan BAKN DPR yang melakukan telaahan hasil audit investigatif BPK terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang.

Apresiasi juga disampaikan terkait usulan BAKN yang mengajukan adanya hak interpelasi untuk menyelesaikan kasus Hambalang. Namun, Priyo berpendapat, karena sudah masuk ranah hukum maka biarkan saja kasus ini ditangani aparat penegak hukum. "Biar KPK menyelesaikan kasus ini (Hambalang). Tidak perlu ke arah interpelasi. Tapi kalau dipandang perlu didesak dengan interpelasi, itu adalah hak anggota DPR yang harus dihormati," paparnya.

Politikus Partai Golkar ini menilai, jika interpelasi digunakan sebagai jalur politik untuk mendesak aspek hukum yang berlaku, hal tersebut tidak salah. Namun, agak berlebihan kalau masalah ini berge-rak di hukum dan masih muncul juga interpelasi.

●radi saputro/dita angga